



INDONESIAINDICATOR

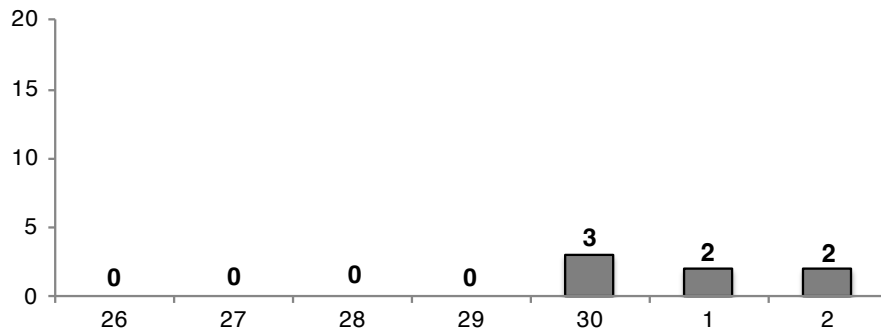
LAPORAN MEDIA CETAK

**Wakil Gubernur Jawa Tengah
(02 Juli 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
1	2	2	0	0

Daily Statistic



Media Share

-

Influencers

-

Table Of Contents : 02 Juli 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	02 Juli 2025	Jateng Pos	Polri Dituntut Semakin Humanis dan Responsif	12	Positive	
2	02 Juli 2025	Jateng Pos	Untuk Honorer yang Tidak Lolos Seleksi CPNS dan CP3K, Pemprov Jateng Upayakan Tak Ada PHK	12	Positive	

Title	Polri Dituntut Semakin Humanis dan Responsif		
Media	Jateng Pos	Reporter	Jan
Date	2025-07-02	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

Polri Dituntut Semakin Humanis dan Responsif



HUT BHAYANGKARA: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin menghadiri HUT Bhayangkara ke-79 di halaman Mapolda Jateng, Selasa 1 Juli 2025.

Gubernur-Wagub Hadiri Upacara HUT Bhayangkara ke-79

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjadi Inspektur Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara yang dilaksanakan di Halaman Mapolda Jateng, Selasa, 1 Juli 2025.

Dalam upacara tersebut, ada lima pesan penting yang disampaikan Ahmad Luthfi kepada seluruh

jajaran Polri, khususnya keluarga besar Polda Jateng.

Kelima pesan tersebut meliputi: Pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan hati yang tulus, sikap yang adil, serta komitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat bukan di atas masyarakat.

Kedua, memperkuat sinergisitas dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas dan kedamaian wilayah Jawa Tengah. Ketiga, menjadi teladan dalam etika dan moralitas, karena wibawa Polri tidak hanya lahir dari seragam

dan kewenangan, tetapi dari integritas pribadi dan keteladanan dalam bertugas.

Keempat, menjaga suasana kondusif dan membantu kesuksesan agenda Pembangunan nasional dan daerah. Kelima, mendekatkan diri kepada rakyat, karena sejatinya kekuatan Polri bukan pada senjata, melainkan pada kepercayaan masyarakat.

"Jadilah teladan dalam etika dan moralitas, karena wibawa Polri tidak hanya lahir dari seragam dan kewenangan, tetapi dari integritas pribadi dan keteladanan dalam bertugas," kata Luthfi.

Tema peringatan Hari

Bhayangkara tahun ini adalah "Polri untuk Masyarakat". Artinya peringatan ini harus menjadi refleksi bahwa eksistensi Polri sejatinya adalah untuk melayani rakyat.

Menurut dia, Polri bukan sekadar penegak hukum, melainkan pengayom, pelindung, dan mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman, damai, dan keadilan sosial.

Dikatakan dia, Polri di era ini dituntut untuk semakin humanis, responsif, dan adaptif. Ketika masyarakat menghadapi tantangan seperti kriminalitas siber, intoleransi, kekerasan, dan disinformasi,

maka Polri hadir bukan hanya dengan ketegasan, melainkan dengan empati dan inovasi.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah transformasi Polri yang telah dilakukan. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, transparansi pelayanan publik melalui digitalisasi, hingga pendekatan proaktif dalam menjaga kamtibmas berbasis kearifan lokal.

"Ini merupakan wujud memberikan jaminan keamanan ketertiban kepada masyarakat. Di Jawa Tengah, hal itu menjadi modal utama dalam rangka jaminan investasi," katanya.

Luthfi juga mengajak untuk terus

bergandengan tangan dalam rangka membangun Jawa Tengah yang aman, damai, sejahtera, maju, dan berkelanjutan.

"Jadikan momentum Hari Bhayangkara ini sebagai penguat semangat pengabdian, demi Indonesia Maju yang kita cita-citakan bersama," kata dia.

Dalam upacara tersebut juga dilakukan penyerahan dan penempatan tanda penghargaan Bintang Bhayangkara Nararya. Penyerahan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada tiga anggota Polri, yaitu AKBP Jodi Setyo Margono, AKP Indra Budianto, dan Aiptu Joko Suprianto. (*)**Jan**

Title	Untuk Honorer yang Tidak Lolos Seleksi CPNS dan CP3K, Pemprov Jateng Upayakan Tak Ada PHK		
Media	Jateng Pos	Reporter	Jan
Date	2025-07-02	Tone	Positive
Page	12	PR Value	

Untuk Honorer yang Tidak Lolos Seleksi CPNS dan CP3K

Pemprov Jateng Upayakan tak Ada PHK



Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengikuti RDP secara daring bersama Komisi II DPR RI, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri.

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menjamin tidak akan memutuskan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

tak lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CP3K).

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) secara daring bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan seluruh kepala daerah daei gubernur hingga bupati/walikota se-Indonesia, Senin, 30 Juni 2025.

"Rapat intinya membahas tentang pegawai-pegawai pemerintahan. Kita tahu ada P3K, ada ASN, ada non-ASN atau honorer, ada guru tidak tetap (GTT). Nah, ini semuanya

kita pikirkan dan closing-nya tidak akan ada PHK," katanya.

Taj Yasin bilang, seperti dalam pembahasan internal Pemprov Jateng akan berupaya mengkomodir usulan-usulan yang muncul dalam RDP tersebut.

Salah satunya jangan sampai ada klaster pengangguran baru akibat PHK pegawai honorer di pemerintahan.

Poin lain yang menjadi usulan Komisi II DPR RI kepada pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, yakni tentang kepastian jenjang karir bagi P3K.

Tidak hanya berhenti pada pengangkatan, akan tetapi memiliki peluang peningkatan jabatan, penghargaan kinerja, dan pengembangan kompetensi secara adil setara Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Tadi baru dirapatkan (DPR), nanti keputusannya teknisnya bagaimana? kita tunggu. Kalau semua usulan itu bisa diterima semua dan haknya bisa dipenuhi semua, maka itu paling bagus. Jadi enggak ada perbedaan ya

antara P3K, dan PNS," katanya.

Taj Yasin juga menyampaikan penekanan soal perhatian bagi GTT. Seperti penempatan di lembaga pendidikan yang tepat supaya mendapatkan jatah jam mengajar, hingga soal perhatian akan kesehatan.

"Pemerintah provinsi juga akan memikirkan bagaimana guru yang non-job ya. Guru-guru yang saat ini enol jam mengajar itu yang harus kita pikirkan," kata dia.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jateng, RR Utami Rahajeng, mengatakan, akan berkoordinasi lanjutan khusus soal penempatan guru dan supaya mendapatkan jam mengajar.

"Prinsipnya, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang paham betul formasinya seperti apa. Kami di BKD bertindak lanjut untuk memetakan yang belum dapat atau masih enol jam mengajar, nanti akan kita prioritaskan," kata dia. (*/jan)